



Informasi Strategis

Rabu, 6 Januari 2021

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14

BIDANG DALAM NEGERI

Amien Rais Mengajak Masyarakat Membentuk TGPF Mandiri Kasus Kematian 6 Anggota FPI di Bawa Ke PBB.

1

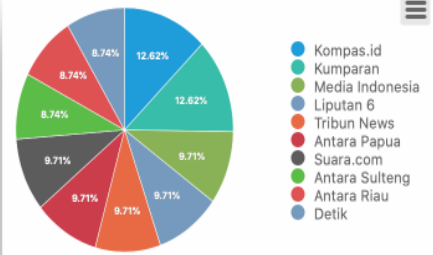
Pada tanggal 5 Januari 2021, Politikus Amien Rais meminta masyarakat tidak putus asa atas sikap pemerintah dalam kasus tewasnya 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Sebaiknya masyarakat sendiri harus berani membentuk TGPF secara mandiri. Karena sudah banyak data dan fakta yang telah terkumpul, baik oleh FPI sendiri maupun elemen masyarakat yang lain.

MEDIA EXPOSURE

392 Media Share

409 Influencer

453 Posting Facebook



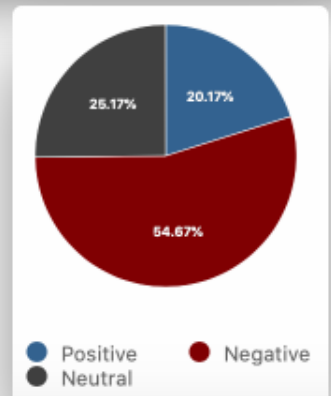
TINGKAT KERAWANAN KABUPATEN/KOTA



TINGKAT KERAWANAN PROVINSI



TINGKAT KERAWANAN NASIONAL



2

ANALISIS

Seruan Politikus Amien Rais membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mandiri atas kematian 6 anggota Laskas FPI bertujuan agar kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Dewan PBB. Hal itu dicontohkan Komisi HAM PBB pernah merespons situasi di negara Myanmar dengan membentuk TGPF internasional. Meskipun demikian ruang membawa kasus tewasnya 6 anggota FPI ke PBB dimungkinkan akan tertutup mengingat Komnas Ham Indonesia telah menindaklanjuti kasus tersebut.



3

DAMPAK

Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mandiri atas kematian 6 anggota Laskas FPI yang diserukan oleh Politikus Amien Rais berdampak meningkatnya suhu politik Indonesia.

4

SARAN

Kemhan bersinergi dengan Menko Polhukam untuk mewaspadaai respon masyarakat atas seruan Politikus Amien Rais terkait Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mandiri gunaantisipasi mendiskriditkan pemerintahan Indonesia dimata Internasional.

WILAYAH PAPUA

EXPOSURE

112 Berita
Lokal – nasional

304,201 Mention
Media Sosial

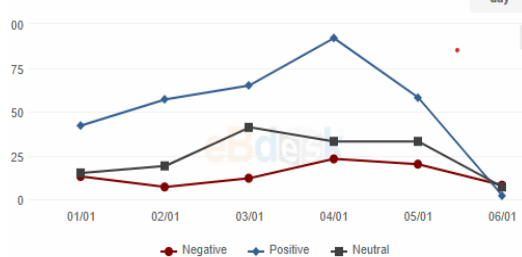
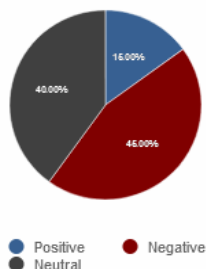
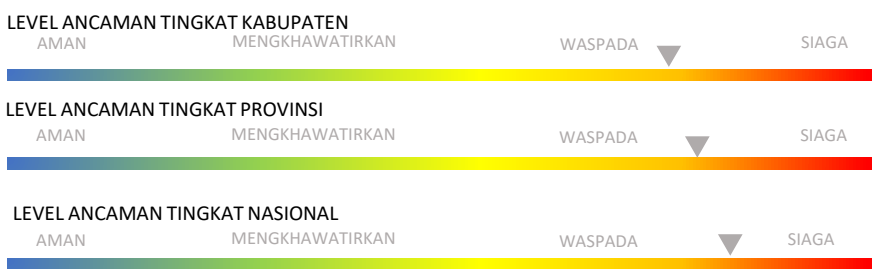


DAMPAK

2 Dengan tertangkapnya kelompok jual beli senjata ilegal kepada KKB akan berdampak terhadap terhentinya pemasok senjata dan amunisi dan rasa aman di Papua

Pemasok Senjata bagi KKS Papua Kembali Ditangkap

1 Buronan yang merupakan pemasok senjata untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya bernama Naftali Tipagau alias Niel Tipagau alias Nataniel Tipagau (25) ditangkap pada Senin (4/1/21). Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menuturkan bahwa Nataniel buron sejak Januari 2020.



3

ANALISA

Dalam kasus jual beli senjata ilegal yang dilakukan kepada KKS, Nataniel yang diduga terlibat dalam transaksi pembelian amunisi bersama-sama dengan Paulus Tebay di Kabupaten Nabire pada bulan Januari 2020, saat itu yang bersangkutan dapat meloloskan diri dari kejaran aparat, dengan ditangkapnya buroran tersebut maka pihak kepolisian dapat mendalami kembali adanya kemungkinan keterlibatan kelompok lainnya

4

SARAN

Kemhan mendorong Polri untuk mengusut secara tegas dan transparan terhadap jual beli senjata ilegal kepada KKS guna meningkatkan keamanan Nasional

Vietnam berharap Jepang menghadapi Beijing dalam perburuan minyak Laut Cina Selatan

1

Perusahaan energi Jepang, Inpex, pada November 2020 telah memenangkan pertarungan hukum selama empat tahun melawan perusahaan Singapura terkait hak konsensi minyak dan gas dengan Vietnam di Blok 05-1B dan 05-1C Laut China Selatan (LCS).



2

China selalu menggagalkan upaya Vietnam untuk melakukan pengeboran minyak di LCS. Salah satunya adalah proyek bersama PetroVietnam dan Perusahaan Energi Spanyol, Repsol yang harus dihentikan karena adanya tekanan China pada tahun 2017. Kerjasama kali ini dengan Jepang, diyakini akan berhasil mengingat Jepang dinilai cukup kuat menghadapi China. Selain itu, Jepang juga merupakan aliansi utama AS di kawasan.



ANALISIS

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Kerjasama Vietnam dan Jepang akan memicu China untuk melakukan berbagai aktivitas provokasi maritim di kawasan sehingga berdampak pada meningkatnya ketegangan di kawasan

4

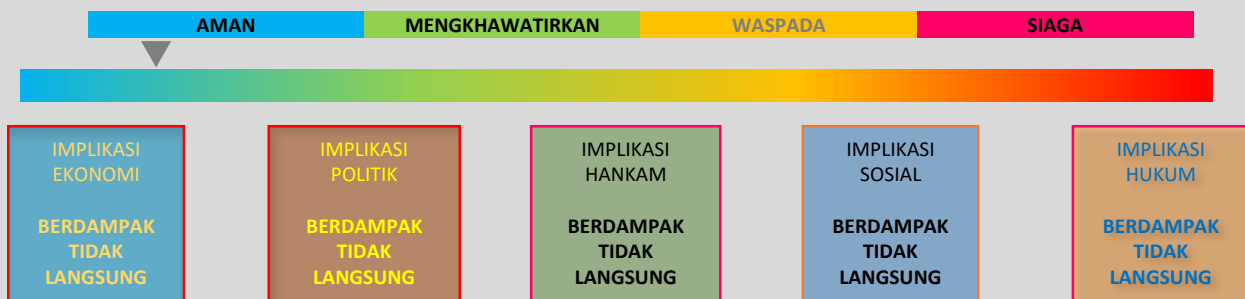
SARAN

Pemerintah Indonesia perlu memperketat pengamanan di kawasan Natuna Utara sebagai upaya pencegahan eskalasi konflik Vietnam dan China.

1 FAKTA/DATA Perpanjangan Pemberlakuan *Lockdown* di Inggris

Pada tanggal 4 Januari 2021 Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan pemberlakuan *lockdown* nasional yang baru untuk mengurangi tingkat penularan *Covid-19*. Johnson menyatakan bahwa *lockdown* akan dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 5 Januari 2021 dan jika situasi membaik, akan berakhir pada pertengahan Februari 2021.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2 ANALISA

1. Perpanjangan pemberlakuan *lockdown* oleh Pemerintah Inggris merupakan respon atas peningkatan tajam jumlah orang yang tertular *Covid-19* sejak ditemukannya varian baru virus di Inggris. Pemberlakuan *lockdown* ini sebagian juga terkait dengan upaya vaksinasi yang baru dimulai dan belum mencapai *critical mass* atau jumlah minimum warga penerima vaksin yang diperlukan agar populasi terlindungi.
2. Perpanjangan *lockdown* dipandang sebagai respon awal yang mudah di tengah dinamika penanganan pandemi di Inggris. Inggris sejauh ini menjadi negara ke-6 dengan tingkat kematian tertinggi akibat *Covid-19* dan dengan tren peningkatan penularan diperkirakan layanan kesehatan akan kelebihan beban dalam 21 hari.

3 DAMPAK

Perpanjangan periode *lockdown* di Inggris akan semakin menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Inggris.

4 SARAN

1. Kemhan mendorong satker-satker untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi dengan pihak-pihak yang kemungkinan pernah berada di Inggris atau negara-negara Eropa lain ketika varian virus baru telah ditemukan.
2. Kemhan memberikan masukan kepada Satgas *Covid-19* untuk memperketat lalu lintas orang masuk ke wilayah Indonesia dari kawasan atau negara dengan tingkat penularan yang tinggi seperti Eropa, Brazil, dan India.
3. Kemhan berkoordinasi dengan Satgas *Covid-19*, Mabes TNI, dan Kemenkes mulai memetakan kapabilitas TNI, baik personel maupun peralatan yang dapat diberdayakan jika Pemerintah memutuskan untuk memperketat karantina bagi orang masuk ke wilayah Indonesia.